



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /RENKEU/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEGIATAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penatausahaan dan tertib administrasi lingkup Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Tim Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Perencanaan dan Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pengelola Keuangan dan Kegiatan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004....

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/000.1.2.3/533/Renkeu.1/XI/2025 Tanggal 04 November 2025 Hal : Mohon Persetujuan Penyusunan dan Koreksi Keputusan Bupati untuk Tim Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026;

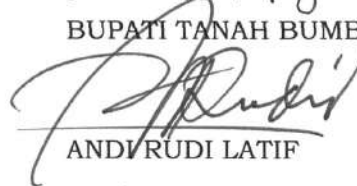
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI FASILITASI KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan tugasnya sebagai berikut:
- a. membina, mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. membina pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan serta mengatur kegiatan penganggaran APBD di lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. penatausahaan tertib administrasi pertanggungjawaban di lingkup Sekretariat Daerah dan sinkronisasi terhadap bendahara pengeluaran pembantu tentang laporan hasil kinerja kegiatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. mengevaluasi....

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan di lingkup Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026, melalui DPA Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kode Rekening 5.1.1.02.05.0001, 5.1.1.02.05.0002 dan Kode Rekening 5.1.01.02.05.0002
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Di tetapkan di Batulicin,
pada tanggal, 7 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDIRUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /RENKEU/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI FASILITASI KEGIATAN
PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEGIATAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KEGIATAN PERENCANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua II
5.	Asisten Administrasi Umum	Ketua III
6.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Wakil Ketua I
7.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Wakil Ketua II
8.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua III
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris I
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris II
11.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris III
12.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan	Anggota
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
17.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
18.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
19.	Kepala Bagian Umum	Anggota
20.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota

21.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
22.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang	Anggota
24.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang	Anggota
25.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang	Anggota
26.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
27.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
28.	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
29.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum	Anggota
35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Bagiab Umum	Anggota
36.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
37.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
38.	Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
39.	Kepala Sub Bidang Anggaran II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
40.	Kepala Sub Binamental Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota

45.	Kepala Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
46.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
47.	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
48.	Fungsional Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
49.	Fungsional Perencana Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
50.	Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
51.	Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
52.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
53.	Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
54.	Penata Layanan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
55.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
56.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
57.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum	Anggota
58.	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Anggota
59.	Pengelola Keuangan Bagian Pemerintahan	Anggota
60.	Pengelola Keuangan Bagian Hukum	Anggota
61.	Pengelola Keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
62.	Pengelola Perencanaan dan Keuangan Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan	Anggota
63.	Pengelola Keuangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
64.	Pengelola Keuangan Bagian Organisasi	Anggota
65.	Pengelola Keuangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
66.	Pengelola Keuangan Bagian Umum	Anggota

67.	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Bagian Pemerintahan	Anggota
68.	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
69.	Pengelola Perencanaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
70.	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Bagian Umum	Anggota
71.	Pengelola Perencanaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
72.	Pengelola Pelaporan Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan	Anggota
73.	Pengelola Pelaporan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
74.	Pengelola Pelaporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
75.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
76.	Penata Layanan Operasional Bagian Umum	Anggota
77.	Penata Layanan Operasional Bagian Umum	Anggota
78.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Umum	Anggota
79.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi	Anggota
80.	Penata Layanan Operasional Bagian Hukum	Anggota
81.	Penata Layanan Operasional Bagian Hukum	Anggota
82.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Hukum	Anggota
83.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
84.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
85.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
86.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
87.	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
88.	Perencana Ahli Pertama Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
89.	Perencana Ahli Pertama Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
90.	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

91.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
92.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
93.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
94.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
95.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
96.	Penata Layanan Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
97.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
98.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
99.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
100.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
101.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
102.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
103.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
104.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
105.	Penata Layanan Operasional Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
106.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
107.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Pengadaan Barang Jasa	Anggota
108.	Penata Layanan Operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
109.	Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan	Anggota
110.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Pemerintahan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI/RUDI LATIF